



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Indroharto (I). 1996. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Paulus Effendi Lotulung. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta : Salemba Humanika.

Philipus M. Hadjon, Dkk. 1997. *Pengantar Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Riawan Tjandra. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara PTUN Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta : Liberty.

S.F Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.

Subekti R. dan Tjitrosoedibio. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramitha,.

Sudikno Mertokusumo. 2000. *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty

W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. 2004. *Litis Domini Principle*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya

Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.

Subekti R. dan Tjitrosoedibio. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramitha,.

Sudikno Mertokusumo. 2000. *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty

W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. 2004. *Litis Domini Principle*. Yogyakarta : Universitas Atmaja

### Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepulauan Riau dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal Mahkamah edisi 11 Oktober 1996. M. Husnu Abadi. *Keputusan Tidak Tertulis Sebagai Objek Sengketa Pada PTUN.*

Kadar Slamet. Mei 2009. *“Subyek (Penggugat Dan Tergugat) Serta Perkembangan Subyek Dan Obyek Dalam Yurisprudensi TUN”.*

**Internet**

[http://ptun-pekanbaru.go.id/.](http://ptun-pekanbaru.go.id/)

Ruslan Effendi dan Doddi Panjaitan, *Ketidak Absahan Kewenangan Aparat Terhadap Produk Hukum Yang Dhasilkan.*  
[http://doddipanjaitan.blogspot.com/2011/04/ketidakabsahankewenangan-aparat.html.](http://doddipanjaitan.blogspot.com/2011/04/ketidakabsahankewenangan-aparat.html)